

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Fenomena pelaporan keuangan pemerintahan daerah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Ternyata di dalam laporan keuangan pemerintahan masih banyak disajikan data data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh badan pemeriksa keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintahan Desiana (2014).

Laporan keuangan yang telah dihasilkan oleh pemerintah daerah akan digunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar pengambilan keputusan. Adapun komponen yang disampaikan meliputi: Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dijelaskan bahwa laporan keuangan yang berkualitas harus memenuhi empat karakteristik kualitatif, yaitu: Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah merupakan tuntutan publik akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh

aparatur yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah serta harus memahami sistem akuntansi, khususnya akuntansi keuangan daerah agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah sudah berkualitas yaitu opini wajar tanpa pengecualian yang di berikan badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Menghadapi kondisi yang demikian pemerintah melakukan reformasi di segala sektor pemerintahan termasuk yang di tandai dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, maka tuntutan sampai besar kepada sektor publik termasuk pemerintah daerah untuk mengelolah dan mempertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabilitas setiap rupiah dana yang di terima dari masyarakat. Dalam pengelolah dan masyarakat maka ilmu Akuntansi paling cepat dapat diterima sebagai salah satu alat/media yang dapat di gunakan untuk dapat memenuhi transparansi dan akuntabilitas dimaksud, melalui suatu Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (*SAP*), yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi merupakan pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar Akuntani Pemerintah sampai dengan tahun anggaran 2013, pemerintah daerah masih menerapkan *SAP* berdasarkan peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Perbedaan fundamental peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 terletak pada basis pencatatan transaksi dan jenis laporan keuangan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah sistem pengendalian intern. Menurut (Mahmudi, 2011) sistem pengendalian intern

adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penerapan pengendalian intern yang memadai akan memberikan keyakinan terhadap kualitas atau keandalan laporan keuangan, serta akan meningkatkan kepercayaan *stakeholders*.

Adanya penerapan sistem pengendalian intern yang baik dan benar akan menjamin terwujudnya penerapan prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi yang tepat di masing-masing SKPD. Penelitian (Rohman, 2012) menyatakan bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah Kab. Demak TA 2018, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). terdapat empat unsur penilaian yang mendapat perhatian pemkab, meliputi kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP),

kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah kabupaten Demak diantaranya adalah penerapan standar akuntansi pemerintah, sistem akuntansi keuangan dan kompetensi sumber daya manusia.

Tabel 1
Hasil Audit BPK
Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Demak

Tahun	Hasil Audit
2014	Wajar Tanpa Pengecualian
2015	Wajar Tanpa Pengecualian
2016	Wajar Tanpa Pengecualian
2017	Wajar Tanpa Pengecualian
2018	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber : Badan Penyelidik Keuangan (BPK)

Hal yang mendasar dan penting dalam pengelolaan keuangan daerah adalah pemahaman akan standar yang diterapkan. Dalam pp no 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah bahwa standar akuntansi pemerintah adalah prinsip prinsip akuntansi yang ditetapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya dasar peraturan tentang standar akuntansi pemerintah, pemerintah untuk dapat menerapkan standar akuntansi pemerintah sebagai landasan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang baik dan berkualitas dalam rangka menciptakan pemerintah yang baik. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu

opini wajar tanpa pengecualian yang di berikan oleh badan pemeriksa keuangan terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian Runtuwene, dkk (2017) menunjukkan bahwa SAP berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan. Hal tersebut menggambarkan penerapan SAP di Kabupaten Minahasa Selatan telah cukup baik, namun belum maksimal. Hal tersebut dipengaruhi karena pengelola keuangan di tingkat SKPD yang ada di Kabupaten Minahasa Selatan sebagian besar tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga pemahaman dan penerapan SAP berbasis akrual di tingkat SKPD belum maksimal, demikian juga hasil penelitian dari Yusniyar, dkk (2016) akuntansi pemerintahan, secara simultan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

Sebaliknya Ramadhan (2018) menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga hasil penelitian dari Inapty, dkk (2016) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintahan tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah karena penerapan standar akuntansi pemerintahan masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan kompetensi aparatur yang minimal, banyaknya pengelola keuangan yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen).

Selain itu dalam penyusunan laporan keuangan juga diperlukan sistem akuntansi keuangan daerah. Di mana untuk menghasilkan laporan keuangan daerah dibutuhkan suatu sistem akuntansi keuangan daerah. Sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan.

Hal ini sesuai dengan penelitian Wati, dkk (2014) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan suatu prosedur dari tahap awal pengumpulan data sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (Permendagri No. 59 Tahun 2007). Jika sistem akuntansi belum dipahami maka akan dapat menghambat dalam penyusunan laporan keuangan. Hasil penelitian tersebut di dukung oleh Adhitama (2017) yang menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Sebaliknya menurut Ihsanti (2014) sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan hal ini menunjukkan bahwa dilihat dari fakta yang terjadi di Pemda Kab. Lima Puluh Kota berdasarkan pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2007 sampai dengan tahun anggaran 2012 memperoleh opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP), yang mana masih ada keku-rangan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Salah satunya yaitu dalam penerapan SAKD belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan standar yang berlaku.

Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas juga dibutuhkan SDM yang memahami dan kompeten dalam akuntansi pemerintahan, keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan. Menurut Putri dkk (2015) Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan dan pengalaman yang cukup memadai.

Ihsanti (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Dengan demikian, jika kom-petensi SDM bagian keuangan/ akuntansi pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota baik, dalam artian SDM keuangan/akuntansi tersebut kompe-ten, maka kualitas laporan keuangan daerah yang dihasilkan pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota lebih baik. Ini juga disertai dengan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan yang dimiliki oleh responden dalam mem-buat laporan keuangan. Selain itu pengalaman kerja, kemampuan kerja dan pelatihan yang dimiliki oleh seorang pegawai pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota bisa mempengaruhi kualitas sumber daya manusia.

Sebaliknya penelitian dari Ramadhan (2018) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini berarti tidak semua aparatur yang memiliki tingkat pendidikan yang lebih tinggi paham dan bisa menyelesaikan

permasalahan dalam laporan keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, pegawai dituntut untuk dapat memahami penyusunan laporan dengan menggunakan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan, sehingga kurang memperhatikan latar belakang pendidikan pegawai.

Berdasar hasil hasil penelitian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa faktor faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan masih terdapat perbedaan, oleh karena itu maka penelitian layak untuk di teliti kembali. Penelitian ini mereplikasi dari penelitian Rahayu (2014) tentang Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah dengan menambah variabel Sistem pengendalian internal sebagai variabel independen. Populasi penelitian yang digunakan adalah 34 SKPD yang ada di Kabupaten Demak. Berdasarkan uraian tersebut diatas maka judul penelitian ini adalah **“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Kompetensi SDM Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan perbedaan dari hasil penelitian yang telah dijabarkan pada latar belakang penelitian ini, maka pokok permasalahan di dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
2. Bagaimana pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?

3. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?
4. Bagaimana pengaruh Kompetensi Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah ?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas dapat dirumuskan tujuan penelitian adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.
4. Untuk menguji dan menganalisis Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.

1.4. Manfaat Penelitian

Pada penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kontribusi untuk berbagai pihak diantaranya sebagai berikut:

1) Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah (SAKD), Kompetensi Sumber daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Daerah yang saat ini masih banyak kekurangan dalam pelaporan serta pertanggungjawabannya.

2) Aspek Praktis

Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah

Dapat dijadikan bahan masukan serta alternatif Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Sistem Akuntansi Keuangan pemerintah (SAKD), Kompetensi Sumber daya Manusia, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah.